

NEGARA IDEAL DAN TRANSFORMATIF YANG DIBUTUHKAN BANGSA INDONESIA: STUDI POLITIK AL-MAWARDI

Aiyuhan Nurul Ain
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ayuhannurul216@gmail.com

Abstrak: Pemimpin yang ideal akan membawa perubahan yang baik. Sebagaimana teori politik al-Mawardi yang menjelaskan bahwa negara ideal akan tercipta ketika pemimpinnya memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin. Diantaranya yaitu adil, berpengetahuan luas, tidak cacat panca indranya, tidak cacat organ tubuhnya, cerdas, berani, dan yang terakhir nasab dari Quraisy. Adapun tipe kepemimpinan transformatif, yang mana berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi setiap proses pertukaran atau perubahan, seperti keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab. Bangsa Indonesia membutuhkan seseorang yang berkarakter negarawan dan visioner untuk memimpin bangsa ke depan, yang siap mengesampingkan kepentingan pribadi, berani ambil resiko, dan mau bekerja nyata untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Tidak hanya itu, pemimpin yang baik dalam mengambil kebijakan dan keputusan harus mengacu pada Pancasila.

Kata kunci: Negara Ideal, Transformatif, Politik al-Mawardi

Abstract: The ideal leader will bring about good changes. As al-Mawardi's political theory which explains that the ideal state will be created when the leader meets the requirements as a leader. Among them are fair, knowledgeable, not defective in his five senses, not defective in his organs, intelligent, brave, and the last lineage from Quraish. The type of transformative leadership is related to values that are relevant to any exchange or change process, such as fairness, honesty, and responsibility. The Indonesian nation needs someone who has the character of a statesman and a visionary to lead the nation forward, who is ready to put aside personal interests, is willing to take risks, and is willing to work real to advance and prosper the nation's life. Not only that, a good leader in making policies and decisions must refer to Pancasila.

Key Word: *Ideal State, Transformative, Politics of al-Mawardi*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari yang namanya "Politik". Hal itu karena politik dapat menjadi sebuah sistem yang mengatur hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya itu, politik juga bisa mengantarkan mereka kepada tujuan yang ingin dicapai bersama (Fuad Muhammad Zein, 2016: 491). Studi politik tidak hanya mencakup pengelolaan masalah publik, struktur dan organisasi pemerintah. Tetapi juga mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai manusia, serta berkaitan dengan teori dan praktek agar tercapai sebuah negara yang ideal (Henry J. Schmandt: 2015, v). Meski wacana kepemimpinan dalam membentuk suatu negara yang ideal sudah banyak diulas, namun wacana tersebut tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membentuk negara ideal, kepemimpinan menjadi hal yang menarik dan memperoleh perhatian khusus di berbagai kalangan dan ahli (Kartika Cahya Widayanti dan Farida Nurani, 2019: 2).

Banyak teori maupun pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, salah satu tokohnya yaitu Al-Mawardi. Ia merupakan tokoh pemikir Islam klasik yang menjelaskan secara rinci mengenai sistem pemerintahan, diantaranya mengenai kepemimpinan yang

mampu membentuk negara ideal (Rashda Diana, 2017: 159). Setiap ahli memiliki pandangan yang beragam terkait kepemimpinan, meskipun demikian, teori para ahli sebetulnya tidak begitu ada gesekan pandangan yang tajam terkait kepemimpinan tersebut. Rhenald Kasali berpendapat bahwa jumlah pemimpin terhitung banyak, tetapi yang membedakan pemimpin satu dengan yang lainnya yaitu tipe. Oleh sebab itu, untuk menjadi pemimpin dibutuhkan lebih dari sekedar aturan, melakukan terobosan dan respek. Sebagai contoh sebuah organisasi, ia bisa tertib dan teratur, namun bisa juga mati karena peraturan terlambat merespon suatu perubahan dan peraturan yang ada bukan lagi untuk manusia, melainkan manusia ada untuk peraturan (Kartika Cahya Widyanti dan Farida Nurani, 2019: 2).

Pemimpin suatu negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, baik untuk agama maupun politik (Mutasir, 2018: 1). Oleh karena itu, pemimpin yang baik seharusnya tidak dihasilkan dari satu macam tipe kepemimpinan tertentu, melainkan dengan kemampuan mengetahui “kapan” menggunakan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan (Kartika Cahya Widyanti dan Farida Nurani, 2019: 2). Seperti halnya kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini merupakan dampak dari satu masalah atau disebut juga krisis. Krisis itu tidak hanya berdampak pada satu atau dua golongan, tetapi dapat menghancurkan persatuan Indonesia. Krisis tersebut di antaranya yaitu *pertama*, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau aparaturnya. Hal itu disebabkan karena masyarakat menganggap pemerintah sebagai pemimpin kurang bertanggung jawab dan tidak memperhatikan keadaan masyarakatnya. *Kedua*, krisis karakter pemimpin, krisis inilah yang sering memancing kemarahan rakyat (Imam Mawardi, 2017: 39).

Tulisan ini, bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan terkait tipe kepemimpinan di Indonesia, sebagai sebuah refleksi dalam menciptakan negara yang ideal dan transformatif yang diinginkan bangsa Indonesia di masa mendatang. Dalam pembahasan tersebut, penulis memfokuskan pada teori kenegaraan Al-Mawardi sebagai rujukan dalam menciptakan negara yang ideal dan transformatif. Harapannya, hasil tulisan ini dapat memberi sumbangan dalam khazanah pemikiran politik dan mungkin dapat diterapkan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan berdasarkan pendekatan filosofis (Evan Edo Prasetya, 2021: 46). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji teori politik Imam Al-Mawardi. Adapun sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema penelitian. Data-data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dikodifikasi serta dianalisis (Dina Fadiyah, 2018: 102).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Mawardi dan Pemikiran Politiknya

Al-Mawardi merupakan tokoh pemikir politik Islam klasik yang hidup sekitar abad ke X. Al-Mawardi mempunyai nama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad. Ia terkenal dengan sebutan Al-Mawardi karena berasal dari keluarga yang ahli membuat *m'aul wardi* atau air mawar untuk dijual. Al-Mawardi lahir di Basrah sekitar tahun 364 H/972 M, ia tinggal di Basrah sejak kecil dan belajar fiqh Syafi'i kepada Abu Qasim ash-

Shaimari dan di Baghdad menyempurnakan keilmuan dalam bidang fikih dengan tokoh Syafi'iyah al-Isfirayini. Selain belajar fiqih, ia juga belajar ilmu bahasa Arab, hadis, dan tafsir. Al-Mawardi wafat sekitar tahun 450 H/1058 M yang dikebumikan di kota al-Manshur di daerah Babi Harb Baghdad (Imam Al-Mawardi, 2020: 5).

Al-Mawardi semasa hidupnya banyak menulis kitab dalam berbagai cabang ilmu. Seperti ilmu bahasa dan sastra, tafsir, fikih, serta ketatanegaraan. Jika disebutkan karya-karyanya yaitu meliputi: a). Bidang Fikih: *Al-Hawi al-Kabir* dan *Al-Iqna'u*. b). Bidang Politik: *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*; *Siyasatu al-Wizarati Wa Siyasatu al-Maliki*; *Tashilu An Nadzari Wata'dilu adz-Dzafiri fi Akhlaqi al-Maliki Wa Siyasatu al-Maliki*; *Siyasatu al-Maliki*; dan *Nashihah al-Muluk*. c). Bidang Tafsir: *Tafsir al-Qur'an al-Karim*; *Al-Amtsal Wa al-Hikamu*; dan *An-Nukatu Wa al-'Uyunu*. d). Bidang Sastra: *Adabu ad-Dunya Wa ad-Dini*. e). Bidang Akidah; *A'lamu an-Nubuwwah* (Mutasir, 2018: 8-10).

Al-Mawardi dalam menulis karyanya tentang kenegaraan tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai duta diplomasi pemerintah Bani Buwaih di satu sisi dan disisi lain sebagai duta diplomasi khalifah Abbasiyah, terutama khalifah Qaim Biamrillah. Disamping itu, Al-Mawardi juga menjadi duta diplomasi di kalangan pemerintah bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah bani Buwaih dengan pemerintah saljuk di awal pemerintahannya. Salah satu diantara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi yaitu untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang berseberangan dengan kubu-kubu lain yang sering berlindung di bawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi (Imam al-Mawardi, 2020: 5).

Pemikiran politik Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya *Ahkam Sulthaniyah* membawa angin segar dalam kajian politik, baik di kalangan umat Islam maupun di Barat. Sebagaimana tokoh terdahulu yang membahas mengenai politik, seperti Plato, Aristoteles, dan Ibnu Arabi. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, namun Al-Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Ia juga berpendapat bahwa kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual seperti bakat, kemampuan dan kecenderungan, mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan bekerja sama. Oleh karena itu, adanya negara karena hajat manusia itu sendiri, guna mencukupi kebutuhan mereka bersama (Syafuruddin Syam, 2017: 489).

Adapun ciri khas politik Al-Mawardi yaitu memformulasikan sebuah gerakan politis sebagai respon terhadap sebuah fakta dengan mempertahankan status quo (Muhammad Amin, 2016: 123). Prinsip-prinsip jabatan seorang pemimpin berkaitan erat dengan tingkah laku penguasa itu sendiri dan berimplikasi dengan semua prinsip yang menyangkut urusan pemerintahan. Di mana kebanyakan penguasa terlalu asyik dalam urusan negara dan diplomasi. Oleh sebab itu, diharapkan penguasa mengetahui ikatan yang sebenarnya antara pemimpin dengan rakyatnya. Sehingga antara pemerintah dan rakyat bisa saling mengayomi demi terciptanya keadilan yang diharapkan (Qamaruddin Khan, 2002: 39).

Al-Mawardi dalam kitabnya *Tashilu an Natzar wa Ta'jilu az Zufri fi Akhlaqi al Mulk* juga memberikan nasehat kepada para pemimpin dalam mengambil keputusan diharuskan bermusyawarah dengan para *ahlul 'ilmi*. Hal itu bertujuan agar keputusan yang diambil benar-benar jernih dan kemungkinan salahnya kecil (Fuad Muhammad Zein, 2016: 504-505). Adapun syarat-syarat pemimpin yang disebutkan Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* sebagai berikut:

1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh

2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum
3. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma' (Imam al-Mawardi, 2020: 11).

Problem yang muncul kemudian yaitu apakah bangsa Arab dan suku Quraisy yang dimaksud Al-Mawardi dalam persoalan ini terkait langsung dengan etnis yang sifatnya material biologis, atau terdapat asumsi yang lebih substantif yang melatar belakangi pernyataan tersebut, dimana sifatnya sosio-filosofis? (Muhammad Amin, 2016: 123). Dalam artikel yang ditulis Saifuddin, dijelaskan bahwa upaya Al-Mawardi dalam mempertahankan etnis Quraisy, secara kontekstual interpretatif dapat dikatakan bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, namun pada kemampuan dan kewibawaannya. Sehingga mengutamakan etnis Quraisy memang bukan ajaran dasar agama Islam yang dibawa Rasulullah, oleh karena itu, hadist-hadist yang mengutamakan etnis Quraisy harus dipahami sebagai ajaran yang bersifat temporal (Saifuddin Syam, 2017: 488).

Al-Mawardi juga mengatakan bahwa berdirinya negara membutuhkan enam sendi utama. Di antara sendi-sendi tersebut yang *pertama*, yaitu agama. Agama sebagai pedoman dan sendi dasar kehidupan bermasyarakat, selain itu agama berfungsi sebagai kekuatan moral yang dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia. Sehingga agama dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan, ketenangan jiwa dan negara. *Kedua*, penguasa kharismatik, seorang pemimpin harus mempunyai kharisma berwibawa dan dapat diteladani. Pemimpin yang kharismatik dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, serta menjamin eksistensi negara dari berbagai ancaman yang muncul, baik internal maupun eksternal. *Ketiga*, keadilan menyeluruh, keadilan menjadi syarat yang sangat penting karena dengan keadilan akan tercipta kerukunan sesama negara, ketaatan pada pemimpin, serta tercipta kehidupan rakyat yang tentram (Rashda Diana, dkk, 2018: 372).

Keempat, keamanan yang kuat dan menjamin, hal ini akan memberi *inner peace* (kedamaian batin atau ketenangan jiwa), jika tercipta rasa aman dan ketenangan, maka rakyat akan semakin patuh kepada pemimpinnya. *Kelima*, kesuburan tanah, yang dapat menjamin kebutuhan pangan rakyat. Negara harus menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha negara dan rakyat. Sehingga rakyat bisa hidup layak dan sejahtera, serta konflik antar penduduk juga dapat teratasi. *Keenam*, harapan, yaitu harapan bagi kelangsungan hidup generasi saat ini dengan generasi setelahnya, karena generasi masa kita merupakan pewaris dari generasi sebelumnya, dan generasi saat inilah yang mengukir sejarah bagi generasi yang akan datang. Keenam sendi tersebut merupakan pilar-pilar penyangga kehidupan bermasyarakat dan menjadi prinsip-prinsip dasar membangun komunitas sosial (Rashda Diana, dkk, 2018: 373).

Adapun tugas-tugas pemimpin atau *imam* (khalifah) yang disebutkan dalam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya
2. Menegakkan hukum agar tercipta keadilan
3. Melindungi negara supaya rakyat merasa aman
4. Memberlakukan hukum dengan tegas agar tidak diselewengkan dan diremehkan
5. Menjaga wilayah perbatasan sehingga musuh tidak bisa masuk
6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam
7. Mengambil harta *fai* dan zakat sesuai syariat
8. Menentukan gaji serta anggaran wajib lainnya
9. Mengangkat orang-orang yang profesional dalam bidangnya dan jujur dalam melaksanakan tugasnya
10. Berusaha terjun langsung dalam menangani persoalan serta mengamati keadaan lapangan.

Kepemimpinan dalam Negara Ideal dan Transformatif

Kepemimpinan didefinisikan James Macgregor Burns dalam bukunya yang berjudul *Leadership* dimaknai sebagai *fenomena yang paling banyak dicermati dan paling jarang dimengerti*. Banyak kajian tentang kepemimpinan, tapi tetap saja kepemimpinan hadir sebagai konsep yang multi tafsir. Ide kepemimpinan muncul pada sebuah kondisi dimana adanya interaksi antara dua orang atau lebih dalam upaya memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan tertentu. Namun perlu dipahami bahwa atribut-atribut yang hadir dalam kondisi itu bukan hanya kepemimpinan dan bukan hal yang dapat dilepaskan dari kondisi itu. Kepemimpinan tidak dapat dikeluarkan dan dipilah dari kondisi itu, dan tak dapat pula ditentukan secara jelas dan tegas batas-batasnya, serta tidak dapat dipilah secara jernih keberadaannya dari kondisi yang melingkupinya dan muncul bersamaan dengannya. Hal tersebut menjadi sebab utama dari kesulitan mendefinisikan makna kepemimpinan (Joko Rizkie Widokarti, 2013: 2-3).

Filsuf Yunani yang bernama Plato dalam bukunya yang berjudul *Republic* menjelaskan tentang pemimpin yang baik yaitu orang yang mengerti tentang kebenaran dan dapat membantu rakyatnya memahami apa itu kebenaran. Seperti halnya gurunya, Aristoteles lebih menekankan keseimbangan rasio, moral dan sosial pada manusia agar bisa mencapai kebahagiaan. Sehingga pemimpin dengan rasionalitas dan moralitasnya dapat membantu rakyatnya mencapai kehidupan sosial yang produktif. Adapun tokoh dari Cina yang bernama Lao-tzu dalam kitabnya *Tao Te Ching* menjelaskan bahwa pemimpin yang baik yaitu mereka yang mampu meniadakan kediriannya, meninggalkan egonya demi kepentingan rakyatnya (Kartika Cahya Widyanti dan Farida Nurani, 2019: 3).

Pemimpin yang baik selalu menginginkan kedamaian dan menciptakan keharmonisan, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat tercapai jika seorang pemimpin memiliki karakter yang baik, budi pekerti yang luhur, sehingga pemimpin dapat menghasilkan tujuan yang baik serta pengikut yang baik. Robbins dalam (Imam Mawardi, 2017: 21) berpendapat bahwa pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian suatu tujuan. Dalam pemahaman Jawa, kekuasaan sangat tergantung dari keluhuran budinya. Ia harus *sepi ing pamrih* yang bermakna pemimpin tidak boleh terikat oleh hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan duniawi. Pemimpin harus bersih dari angkara murka supaya dapat menjadi *hening, bening, hawa, dan heling* (diam, jernih, awas, ingat).

Pemimpin juga memiliki peran strategis dalam melakukan optimalisasi kinerja aparat negara. Selain itu, pemimpin mempunyai fungsi vital dalam membuat rencana strategis dan keputusan yang ingin dicapai sebuah negara. Pembuatan kebijakan juga

menjadikan pemimpin melakukan evaluasi kinerja serta solusi dalam setiap problema sebuah negara. Pemimpin yang ideal, dituntut untuk mampu mengetahui segala konteks perubahan dan tantangan suatu negara. Sehingga dalam diri seorang pemimpin dibutuhkan kemampuan untuk menangkap berbagai gejala sosial budaya yang ada disekitarnya. Dengan ini perubahan yang seharusnya dilakukan dalam sebuah negara akan segera dapat dilakukan (Utami Dewi, 2014: 6).

Adapun tipe kepemimpinan, salah satunya yaitu kepemimpinan transformasional atau transformatif yang merupakan sebuah proses, di mana para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Para pemimpin transformatif mencoba menumbuhkan kesadaran para pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi seperti keserakahan, kecemburuan atau kebencian. Kepemimpinan transformatif berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi setiap proses pertukaran atau perubahan, seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab, yang justru nilai seperti itu menjadi hal yang sulit di temui di Indonesia (Kartika Cahya Widyanti, 2019: 4).

Kepemimpinan transformatif dalam pendapat lain, didefinisikan sebagai kepemimpinan di mana para pemimpin menggunakan kharisma mereka untuk melakukan transformasi dan revitalisasi para pengikut dan organisasinya. Para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para rakyatnya secara menyeluruh ketimbang memberikan intruksi-intruksi yang bersifat top down. Pemimpin yang transformatif lebih memosisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para rakyatnya. Pemimpin yang transformatif lebih menekankan pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi maupun negara (Kartika Cahya Widyanti, 2019: 4).

Kepemimpinan transformatif menurut Burn, terkadang dipertentangkan dengan model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan apa yang perlu dilakukan para rakyatnya untuk mencapai tujuan negara. Disamping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas negara. Untuk memotivasi bawahannya agar melakukan tanggung jawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan hukuman kepada bawahannya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Matthew R Fairholm bahwa kepemimpinan transaksional merupakan model kepemimpinan dimana satu orang berinisiatif untuk membuat kontak dengan orang lain dengan untuk tujuan pertukaran yang dihargai, fokus pada imbalan dan hukuman dengan proses tawar menawar kinerja. Sedangkan kepemimpinan transformatif menurut Burn pada hakekatnya menekankan pada seorang pemimpin yang perlu memotivasi para rakyatnya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformatif harus mampu mendefinisikan, mengomunikasikan dan mengartikulasikan visi negara, dan rakyat harus mengakui (Utami Dewi, 2014: 8).

Lebih lanjut, Bernard M. Bass dan Bruce J. Avolio mengemukakan bahwa kepemimpinan transformatif mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai *the Four I's*, diantaranya yaitu:

- a. Dimensi yang pertama disebut *idealized influence* (pengaruh ideal). Dimensi pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.

- b. Dimensi yang kedua yaitu sebagai *inspirational motivation* (motivasi inspirasi). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi dan mampu mengunggah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme.
- c. Dimensi yang ketiga disebut *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual). Pemimpin transformatif harus mampu menumbuhkan ide-ide baru memberi solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahannya, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- d. Dimensi yang terakhir adalah menguraikan karakteristik pemimpin disebut *individualized consideration* (konsiderasi individu). Dalam dimensi ini pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan (Utami Dewi, 2014: 9).

Sebenarnya perbedaan antara pemimpin transformatif dan transaksional hanya soal tipe sebuah kepemimpinan. Dimana ada tipe kepemimpinan yang lain, seperti tipe pengelola atau disebut *administrator* dan tipe pemersatu atau *solidarity maker*. Feith dalam (Utami Dewi, 2014: 10) berpendapat bahwa tipe pemimpin pengelola yaitu mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini biasanya diwakili oleh orang-orang terdidik yang menguasai bidang tertentu. Sedangkan tipe pemimpin pemersatu yaitu mereka yang mampu mempengaruhi massa, mendekati mereka, serta mendapatkan simpati dan dukungan dari mereka.

Pemimpin Negara yang Dibutuhkan Bangsa Indonesia

Pemimpin yang ideal akan membawa perubahan yang baik untuk negaranya. Lantas seperti apa pemimpin yang ideal yang dibutuhkan bangsa Indonesia? Hal ini sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya terkait syarat menjadi pemimpin, dan tugas-tugas pemimpin berdasarkan teori politik al-Mawardi, serta tipe pemimpin yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun karakter seorang pemimpin yang dicetuskan oleh seseorang yang berasal dari Jerman, ia mengatakan bahwa ada empat ciri dasar yang membentuk karakter seorang pemimpin, 1). Keteraturan interior, dimana nilai menjadi pedoman setiap tindakan; 2). Koherensi yang memberi keberanian, yaitu kondisi dimana seseorang teguh dalam prinsip, tidak mudah terombang ambing atau takut menghadapi resiko; 3). Otonomi, disitulah seseorang menginternalisasikan aturan dari luar hingga menjadi nilai-nilai pribadi.; 4). Keteguhan dan kesetiaan (Imam Mawardi, 2017: 45).

Gelombang perubahan yang terus menerus melanda hampir semua sisi kehidupan, pada akhirnya berkembang menjadi perubahan yang berlangsung lama dan memaksa semua negara untuk selalu siap menerima, memahami, mengantisipasi, mengelola dan menyesuaikan diri pada perubahan itu sendiri serta harus selalu siap untuk melakukan perubahan. Peran pemimpin dan faktor kepemimpinan dalam sebuah negara dirasakan semakin penting. Pengelolaan sebuah negara tidak lagi dilakukan dengan hanya didasarkan pada keharusan untuk dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari semua sumber daya yang dimiliki, tetapi juga didasarkan pada keharusan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan, memenangkan persaingan serta mempertahankan

keberadaan negara yang kesemuanya bukan hanya memerlukan kehadiran tapi juga peranan seorang pemimpin (Kartika Cahya Widyanti, 2019: 7).

Bangsa Indonesia membutuhkan seseorang yang berkarakter negarawan dan visioner untuk memimpin bangsa ke depan, yang siap mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok, berani ambil resiko, serta mau bekerja nyata untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Selain itu, kepemimpinan di dalam memimpin sebuah negara haruslah seseorang yang memiliki kompetensi kepemimpinan yang efektif. Sebab diyakini bahwa negara masa depan menghadapi perubahan-perubahan yang akan mempengaruhi kehidupan negara. Apapun gaya kepemimpinan yang akan dipilih, dalam kondisi seperti itu negara membutuhkan kepemimpinan yang efektif sehingga bisa mengantarkan negara mencapai tujuannya (Joko Rizkie Widokarti, 2019: 6).

Keefektifan pemimpin dapat terwujud apabila seorang pemimpin mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para rakyatnya, karena hal itu dapat berimplikasi terhadap tercapainya suatu tujuan negara. Selain keefektifan pemimpin, hal lain yang dibutuhkan bangsa Indonesia yaitu kepemimpinan demokrasi. Dimana salah satu pondasi dasar dari pandangan dan pemikiran demokrasi yaitu kemajemukan dan menghargai perbedaan. Tidak hanya itu, demokrasi dipandang sebagai nilai bersama suatu bangsa dalam membangun sistem pemerintahan negara yang bersumber dari rakyat. Keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari neraca perekonomian, tingkat kesejahteraan dan pendidikan, tetapi juga diukur melalui seberapa jauh suatu bangsa dan negara melaksanakan demokrasi yang ideal (Kartika Cahya Widyanti, 2019: 6).

Pemimpin yang ideal akan membawa perubahan yang baik. Selain itu, pemimpin yang ideal bagi bangsa Indonesia juga harus mengacu pada Pancasila. Dimana dalam menentukan segala aspek baik kebijakan, pendapatan maupun kepuasan. Artinya, pemimpin ideal di Indonesia harus mempunyai jiwa dan karakter Pancasila dalam setiap ia mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Dalam hal ini, mengenai pemimpin yang berkarakter Pancasila memberi paparan sebagai berikut: a). Pemimpin harus menjunjung tinggi ketuhanan dan harus bertuhan. b). Pemimpin yang menegakkan Hak Asasi Manusia secara universal. c). Pemimpin yang sadar akan adanya keragaman sosial budaya di Indonesia. d). Pemimpin dituntut untuk memiliki karakter demokratis. e). Pemimpin harus berlaku adil terhadap sesama, membudayakan gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, menghargai hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi (Imam Mawardi, 2017: 46).

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa *status quo* harus dipertahankan agar stabilitas keamanan dan politik tetap terjaga. Oleh karena itu, al-Mawardi mensyaratkan pemimpin harus dari suku Quraisy. Meskipun terlihat diskriminatif, pendapat al-Mawardi itu mengandung upaya preventif terjadinya pemberontakan pada masanya, dimana kondisi dan situasi politik saat itu tidak stabil. Jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan, aturan yang sama juga tampak dalam konstitusi negara. Dimana sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945 pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa hanya mempersyaratkan warga negara Indonesia sebagai kepala negara atau presiden, pasal tersebut berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asli". Aturan tersebut sangat jelas bertujuan untuk menutup kesempatan bagi keturunan warga negara lain menjadi kepala negara (Rahmawati, 2018: 275).

Adapun kedudukan non-muslim dalam pemerintahan di Indonesia, dimana jika dikaitkan dengan konteks keberagaman serta toleransi dalam Islam, al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* membolehkan seseorang non-muslim menduduki jabatan dalam pemerintahan. Namun dalam hal ini al-Mawardi menerangkan bahwa

seorang non-muslim hanya boleh menduduki jabatan sebagai *Wazir Tanfidzi* atau disebut pembantu pemerintah bidang administrasi (Evan Edo Prasaetyo, 2021: 50). Hal tersebut relevan dan dibutuhkan sesuai dengan kondisi negara Indonesia. Dimana syarat pemimpin yang mengharuskan orang Islam, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas orang Islam pasti memilih pemimpin yang beragama Islam pula. Tetapi untuk menteri-menteri di Indonesia tidak mengharuskan orang Islam, selain relevan dengan teori politik al-Mawardi, hal ini karena memang masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama.

Dari berbagai penjelasan di atas, pemimpin negara yang juga dibutuhkan bangsa Indonesia haruslah seorang pemimpin transformatif yang mampu memotivasi para rakyatnya dengan membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil pekerjaan, dan mendorong mereka agar lebih mengutamakan organisasi atau negaranya daripada kepentingan diri sendiri. Selain itu, pemimpin transformatif dirasa tepat serta mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dalam persaingan global (Kartika Cahya Widyanti, 2019: 5). Sehingga negara Indonesia dapat menjadi negara yang ideal serta transformatif yang mengarah ke tujuan lebih baik yang diinginkan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Negara ideal dalam teori politik al-Mawardi akan tercipta ketika pemimpinnya memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin. Syarat-syaratnya yaitu adil, berpengetahuan luas, tidak cacat panca indranya, dan tidak cacat organ tubuhnya, cerdas, berani, dan yang terakhir harus nasab dari Quraisy. Yang terakhir ini jika konteksnya negara Indonesia berarti harus orang asli Indonesia, orang luar Indonesia tidak dapat menjadi pemimpin atau presiden. Adapun pemimpin yang baik, yaitu yang selalu menginginkan kedamaian dan menciptakan keharmonisan, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat tercapai jika seorang pemimpin memiliki karakter yang baik, budi pekerti yang luhur, sehingga pemimpin dapat menghasilkan tujuan yang baik serta rakyat yang baik.

Adapun tipe pemimpin yang mencoba menumbuhkan kesadaran para pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan. Tipe kepemimpinan itu disebut kepemimpinan transformatif, yang mana berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi setiap proses pertukaran atau perubahan, seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Bangsa Indonesia membutuhkan seseorang yang berkarakter negarawan dan visioner untuk memimpin bangsa ke depan, yang siap mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok, berani ambil resiko, serta mau bekerja nyata untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Selain itu, pemimpin yang ideal bagi bangsa Indonesia juga harus mengacu pada pancasila, yaitu harus mempunyai jiwa dan karakter pancasila dalam setiap ia mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. (2020). *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta. Qisthi Press.
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profetik*, 118-120.
- Dewi, U. (2014). Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia: Transaksional Atau Transformatif? *FIS UNY*, 25-27.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam. *TSAQAFAH*, 157-176.

- Prasetya, E. E. (2021). Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al Ahkam As-Sulthaniyyah) . *DIKTUM*, 43-56.
- Fadiyah, D. (2017). Transformasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017. *JIPP*, 100-110.
- Khan, Qomaruddin. (2002). Negara Al-Mawardi. Bandung. Penerbit Pustaka.
- Mawardi, I. (2017). Pancasila Sebagai Landasan Karakter Pemimpin Menuju Perubahan Ideal . *jurnal pendidikan pancasila kewarganegaraan dan hukum*, 39-41.
- Mutasir. (2018). Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi. *Jurnal An-Nida'*, 1-20.
- Widyanti, K. C. (2019). Kepemimpinan Transformatif Yang Dibutuhkan Bangsa Indonesia Sebagai Upaya Menuju Masyarakat Madani. *AP FIA UB*, 2-7.
- Rahmawati. (2018). sistem pemerintahan islam menurut al-mawardi dan aplikasinya di indonesia. *Diktum*, 264-283.
- Schmandt Henry J. (2015). Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Modern. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Syam, S. (2017). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia. *Al-Hadi*, 486-490.
- Widokarti, J. R. (2019). Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani. *UPBJJ-UT*, 21-25.
- Zein, F. M. (2016). Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi). *Mahkamah*, 890-910.